

Domestifikasi Perempuan dalam Gerakan Islam Transnasional di Indonesia 1998 – 2016 M

Rifai Shodiq Fathoni*

Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author: rifai.sf@gmail.com

ABSTRAK

Gerakan Islam Transnasional yang berkembang setelah reformasi, mendudukan perempuan pada posisi kuat dalam rumah tangga. Gerakan ini menggunakan istilah hijrah yaitu mengembalikan perempuan pada fitrahnya sesuai syariat Islam; perempuan bertugas mengurus rumah tangga dan laki-laki bekerja mencari nafkah. Kondisi ini sangat berbeda dengan gerakan kesetaraan gender yang mendorong perempuan untuk berkiprah di wilayah publik dan tidak hanya di wilayah domestik.

Kajian historis melalui literatur menunjukkan bahwa perempuan Indonesia banyak berkiprah pada sektor publik. Pada zaman pra kolonial perempuan Indonesia berperan sentral pada bidang perdagangan dan pertanian, pada zaman kerajaan Hindu Budha bahkan kerajaan Islam pernah terjadi perempuan memimpin kerajaan. Pada zaman Majapahit memerintah Tri Bhuana Tungga Dewi, pada kerajaan Islam di Aceh pernah memimpin Taj-Al Alam Safiatuddin dan Sri Sultanah Nur Al-Alam Nagiat ad-Din Syah yang memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam. Di Jawa juga pernah memerintah kerajaan Islam Pajang yaitu Ratu Kalinyamat. Pada masa pergerakan, perempuan Indonesia juga sangat berperan seperti pejuang perempuan yang sekarang menjadi pahlawan perempuan. Gerakan Islam Transnasional yang menguat memberi andil besar terhadap gerakan perempuan Indonesia yang semakin terdomestifikasi. Gerakan ini kontraproduktif dengan gerakan kesetaraan gender yang telah berkembang di Indonesia pada saat ini.

Kata Kunci: Islam; Transnasional; Domestifikasi; Perempuan; Indonesia

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini gerakan Islam Transnasional muncul sebagai fenomena yang banyak menarik perhatian masyarakat. Kelahiran organisasi itu tidak bisa dilepaskan dari reformasi 1998 yang memicu bermunculannya organisasi-organisasi agama yang selama ini ditekan pemerintah. Beberapa organisasi Islam transnasional yang cukup terkenal adalah Forum Komunikasi Ahlusunah Waljamaah (FKASWJ) yang kemudian melahirkan Laskar Jihad (1999), Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Indonesia. Fenomena ini mencapai puncaknya ketika mereka mulai muncul ke dunia politik, yang terlihat pada beberapa aksi demo pada saat pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tahun 2016. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, gerakan ini lebih menonjolkan budaya Timur Tengah dan memiliki tujuan mendapatkan pengaruh politik. Sasaran dari gerakan ini adalah orang-orang awam yang baru mengenal ajaran Islam dan pada umumnya adalah generasi muda. Dengan berbagai istilah kekinian, mereka mencoba menggaet simpatisan dari generasi tersebut. Kegiatan yang mereka perlihatkan pun pada akhirnya menutupi tujuan utama mereka yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia.

Namun pada tulisan ini tidak akan dibahas lebih jauh mengenai sejarah gerakan ini, tetapi lebih memfokuskan pembahasannya pada domestifikasi perempuan dalam gerakan Islam Transnasional di Indonesia menggunakan perspektif historis. Mungkin masyarakat sudah tidak asing lagi dengan gerakan hijrah atau Indonesia tanpa pacaran yang kini sering kali terlintas di media sosial atau internet. Kegiatan yang

dipromosikan oleh aktivis-aktivis gerakan tersebut, selalu menyerukan istilah hijrah kembali ke fitrah bagi kaum perempuan. Pada titik ini sudah muncul pertanyaan dari istilah itu: apakah perempuan Indonesia jauh dari fitrahnya sebagai perempuan, atau perempuan Indonesia salah dalam menjalani kodratnya sebagai perempuan.

Pertanyaan-pertanyaan ini bertambah semakin menarik, saat mengetahui ajaran gerakan tersebut, yaitu tidak mengharuskan perempuan untuk bekerja, karena mencari rizki adalah tugas suami. Perempuan hanya diwajibkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang menengadahkan tangannya ke suami ketika ingin sesuatu. Kondisi ini mengingatkan pada zaman Kartini, ketika perempuan terasing dari dunia luar dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Dari titik ini kembali muncul pertanyaan, mengapa ajaran demikian muncul dari ajaran Islam? apakah benar Islam mengajarkan seperti itu atau ini hanya sebuah penafsiran untuk mengembalikan kekuasaan laki-laki dalam sistem patriarki? Oleh sebab itu penelitian ini ingin menelusuri lebih jauh bagaimana domestifikasi perempuan dalam gerakan Islam Transnasional yang sekarang sedang gencar-gencarnya masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Topik ini dipilih untuk memberi gambaran yang jelas terkait penyebaran Islam Transnasional yang memberi warna baru terhadap persebaran Islam di Indonesia yang sudah sejak lama berlangsung. Penelitian dilakukan dengan memastikan sumber-sumber sejarah yang meyakinkan. Proses tersebut dalam penelitian sejarah disebut heuristik yaitu proses mengumpulkan sumber atau data yang relevan (Wasino dkk: 2018;23)

PEMBAHASAN

Dinamika Perempuan Indonesia

Perempuan Asia Tenggara dikenal memiliki status lebih terhormat di dalam masyarakat apabila dibandingkan dengan perempuan Arab, Cina dan India. Pada masa pra-kolonial, perempuan Asia Tenggara menduduki posisi sentral di beberapa bidang. Meskipun pria masih mendominasi keseluruhan pekerja, tetapi posisi wanita tidak dapat dianggap remeh, karena peran sentral mereka di sektor perdagangan dan pertanian. Pada saat itu muncul paradigma bahwa perempuan dianggap jauh lebih baik dalam mengurus uang daripada laki-laki. Oleh karena itu perempuan memiliki peran penting di bidang ekonomi (Reid, 2014:167168; Barbara, 1995: 165; Cora, 2017:43).

Di Indonesia wanita telah menduduki posisi terhormat sejak zaman Hindu Budha. Salah satu contoh pada masa pemerintahan Tribhuwanatunggadewi di Majapahit. Tribhuwanatunggadewi merupakan penguasa wanita di Majapahit dengan gelar Abhisekha Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani dan kemudian menikah dengan Cakradhara atau Cakreswara yang menjadi raja di Singasari bergelar Kertawarddhana. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun 1331. Setelah pemberontakan itu, terjadi peristiwa Sumpah Palapa Patih Gajah Mada (Marwati, 1992: 434). Hadirnya penguasa wanita pada masa Hindu Buddha memperlihatkan bahwa wanita juga berhak menjadi penguasa dan menduduki kursi pemerintahan.

Pada masa Islam di Indonesia peran wanita di ruang publik masih tetap tampak. Hal ini terlihat dalam keterlibatan wanita selama pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Di Kerajaan Aceh Darussalam muncul seorang penguasa wanita yaitu istri dari Sultan Iskandar Tsani yang dinobatkan menjadi raja. Sultan Iskandar Tsani meninggal tanpa mempunyai keturunan, sehingga posisinya sebagai raja dihantikan oleh istrinya yaitu putri tertua Sultan Iskandar Muda yang kemudian bergelar Al-Alam Safiatudin Syah pada tahun

1641-1675 (Marwati, 1992: 86). Setelah Safiatuddin wafat pada tahun 1675, ia digantikan seorang perempuan lagi yang bergelar Sri Sultanah Nur Al-Alam Naqiat ad-Din Syah. Peristiwa di Aceh ini cukup menarik, karena biasanya di dalam ajaran Islam laki-laki lebih diprioritaskan sebagai pemimpin, namun fakta di Aceh sebaliknya.

Di Jawa juga terdapat tokoh perempuan yang cukup berperan pada masa kerajaan Islam. Ia adalah Ratu Kalinyamat yang merupakan penguasa wilayah pesisir utara Jawa, daerah Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan putri tertua dari Sultan Trenggana, raja ke 3 dari Kerajaan Demak. Ratu Kalinyamat hidup pada masa konflik politik perebutan kekuasaan antara keturunan Raden Patah (Chusnul, 2000: 38). Kabupaten Jepara yang dipimpinnya pada abad ke 16 adalah pintu gerbang pelabuhan dan bandar perdagangan Kerajaan Demak, sehingga Jepara menjadi daerah yang kaya. Dalam membangun perdagangan, Ratu Kalinyamat melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dengan penguasa di daerah lain. Kerjasama dibangun dengan kerajaan di wilayah pesisir seperti Maluku, Tuban, Johor dan Banten (De Graaf, 2001: 120).

Dalam perang Diponegoro/perang Jawa muncul dua tokoh perempuan kuat yang disegani oleh Belanda. Mereka adalah Raden Ayu Yudokusumo dan Raden Ayu Serang (1762–1855). Keduanya adalah keluarga bangsawan Yogyakarta terkemuka. Raden Ayu Yudokusumo adalah putri dari Sultan pertama sedangkan Raden Ayu Serang adalah mantan istri dari Sultan yang ke dua. Raden Ayu dikenal sebagai pemimpin pasukan yang tegas, dengan berani ia memimpin pasukannya menyerang masyarakat Tionghoa di Ngawi pada 17 September 1825. Aksinya di Ngawi ini membuat Raden Ayu mendapatkan gelar panjang yang garang. Ia adalah salah satu pasukan kavaleri senior Diponegoro di Mancanegara Timur dan kelak bergabung dengan Raden Tumenggung Sosrodilogo di Bojonegoro dalam perlawanan terhadap Belanda di pesisir utara pada 28 November 1827 – 9 Maret 1828. Pada saat itu ia dan Sosrodilogo menyerah kepada Belanda di Madiun pada Oktober 1828, ia bersama anggota lain keluarga besarnya mencukur gundul rambutnya sebagai lambang kesetiaan pada perang sabil. Sementara Nyi Ageng Serang dan anaknya Pangeran Serang II, sangat dihormati karena dianugerahi kesaktian dan masih keturunan dari Sunan Kalijaga. Pada saat perang ia membantu putranya yang memimpin 500 orang di kawasan Serang-Demak pada bulan-bulan pertama perang. Namun, perjuangannya akhirnya berhenti setelah pada 21 Juni 1827, mereka berdua menyerah pada Belanda (Carey, 2018: 33).

Peran perempuan sempat surut karena politik keras Belanda terhadap kaum perempuan pada akhir abad ke 19. Posisi perempuan di sektor-sektor penting seperti di pertanian dan perdagangan pada umumnya dialihkan kepada laki-laki. Sejak saat itu istilah perempuan sebagai kanca wingking atau kasarnya pemuas nafsu mulai akrab ditelinga orang Jawa. Bahkan ada ungkapan bahwa perempuan tidak memiliki tempat di muka umum, karena urusan mereka hanyalah di urusan private (Carey, 2018: xii).

Memasuki abad ke 20, perempuan Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan. Mereka yang sebelumnya terkurung dalam kegelapan patriarkhi, mulai mencari solusi untuk bangkit. Satu per satu organisasi wanita bermunculan seperti Sakolah Istri (1904), Putri Mardika Budhi Utomo (1912), Aisyiah Muhammadiyah (1917) dan Pawiyatan Wanito di Magelang (1918). Dari organisasi-organisasi itu bermunculan tokoh-tokoh wanita berpengaruh seperti Dewi Sartika (1884 – 1947), Siti Walidah Ahmad Dahlan (1872 – 1946) dan Maria Walanda Maramis (1872 – 1924). Pergerakan perempuan ini mencapai puncaknya dengan dibentuknya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 dan diselenggarakannya Konggres I Perempuan Indonesia 22 – 26 Desember 1928 (Cora, 2017: 9)

Pada masa kemerdekaan, perempuan semakin aktif di publik, bahkan pada tahun-tahun pertama kemerdekaan perempuan menjadi pelaku menentang dominasi laki-laki. Organisasi perempuan terbesar pada masa awal kemerdekaan yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) berdiri di gardu terdepan gerakan perempuan. Mereka sangat aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, menentang poligami dan mendukung pemberantasan buta huruf (Saskia, 2010: 41). Berbagai contoh sepak terjang perempuan pada masa lalu menunjukkan bahwa tingginya martabat perempuan diseluruh lapisan masyarakat dan di seluruh pulau menunjukkan adanya perbedaan aktual antara Perempuan Indonesia dengan negara-negara Arab. Di Indonesia meskipun mayoritas beragama Islam, namun kaum perempuan lebih banyak berperan di berbagai sektor dibandingkan dengan negara-negara muslim lain. (Cora, 2017:48).

Kemunculan Gerakan Islam Transnasional di Indonesia

Gerakan Islam Transnasional adalah terminologi yang tergolong baru dalam kajian akademik. Istilah tersebut telah menjadi sebuah penamaan yang secara umum dipahami sebagai sebuah ideologi yang melintasi batas kenegaraan (*nation state*). Munculnya gerakan Islam Transnasional yang marak akhir-akhir ini adalah bagian dari gerakan kebangkitan Islam yang dipelopori oleh gerakan Wahabi di Timur Tengah sejak abad ke 18 (Harun, 1988: 23). Melalui gerakan ini ideologi Islam Transnasional diadopsi oleh gerakan yang lebih muda yaitu Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang berdiri pada awal abad ke 20. Islam Transnasional sendiri merupakan gerakan Islam yang hendak memberlakukan formalisasi Islam dalam tata hukum kenegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Islam Transnasional merupakan nama lain dari Islam Fundamentalis atau Islam Puritan, atau lebih ekstrimnya ada yang menyebut sebagai Islam Radikal. Kelompok-kelompok puritan mempunyai variasi nama dan gerakan, akan tetapi karakter keberagamaan mereka mempunyai benang merah yang sama. Di Indonesia, kelompok tersebut diwakilkan oleh Gerakan Tarbiyyah yang mulai eksis pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pada awalnya gerakan ini adalah gerakan dakwah kampus yang menggunakan sistem tarbiyah Ikhwanul Muslimin Mesir. Gerakan ini cukup militan dan disebut sebagai gerakan Islam ideologi baru, yang sangat berbeda dengan arus besar Islam Indonesia yang terwakili oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Wahid, 2009: 24).

Gerakan Tarbiyah semakin berani tampil ke permukaan masyarakat setelah tumbang rezim Orde Baru pada tahun 1998. Gerakan ini diwakilkan oleh beberapa organisasi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Jama'ah Salafi, Front Pembela Islam (FPI), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dan lain sebagainya (Turmudi & Sihbudi, 2005: 11). Pada masa ini HTI dan FPI merupakan dua lembaga yang paling aktif menghendaki penetapan syariat Islam sepenuhnya dalam tatanan hukum dan sistem pemerintahan Indonesia, sementara PKS menerapkan strategi politik yang lebih moderat dibandingkan keduanya (Wahid, 2009: 96).

Pandangan Gerakan Islam Transnasional Terhadap Perempuan

Tidak dapat dipungkiri penerapan syariat Islam merupakan salah satu tujuan utama dari gerakan Islam Transnasional, namun dalam prakteknya, penerapan hukum syariat di Indonesia sangat sulit karena terbentur oleh Pancasila yang telah menjadi *way of life* bangsa Indonesia. Apabila menengok ke sejarah, beberapa gerakan Islamis seperti DI/TII telah mencoba untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, tetapi karena bertentangan dengan cita-cita dan kultur masyarakat Indonesia usaha itu menuai kegagalan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi hasrat mereka dalam menerapkan syariat Islam, maka budaya Timur Tengah yang katanya syariat Islam itu mulai mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Gaya kearaban yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kehidupan rumah tangga, menjadikan perempuan Indonesia layaknya perempuan yang hidup di Timur Tengah. Celakannya, budaya yang diadopsi adalah budaya Timur Tengah yang konservatif, sehingga para perempuan yang belum menikah hidupnya secara tidak langsung seperti dipingit, seluruh pergaulannya sangat dibatasi. Bahkan untuk hanya sekedar berbicara dengan lawan jenis pun lebih baik tidak dilakukan. Dalam memilih pasangan pengaruh keluarga sangat kuat, pernikahan bisa batal jika keluarga tidak suka dengan calon pasangan (Cora, 2017 : 23) sementara bagi yang sudah menikah, mereka diharapkan berpenampilan layaknya perempuan Timur Tengah menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya. Perilaku ini secara otomatis membatasi ekspresi perempuan dalam menentukan apa yang ingin dia pakai. Tidak hanya berhenti dalam hal pakaian, tata perilaku merekapun diharapkan layaknya perempuan Arab. Mereka pada umumnya dibatasi untuk keluar rumah dan berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar (Wahid, 2009: 167). Pembatasan ini mengakibatkan mereka tidak dapat memilih pekerjaan yang mereka inginkan, yang otomatis menjadikan mereka hanya menjadi ibu rumah tangga yang sangat tergantung pada uang suaminya. Mereka menjadi perempuan zaman feodal, yang harus selalu tunduk pada suaminya dalam segala hal dan tentu ini menjadikan posisi mereka lemah.

Kondisi ini sangat parah dengan ancaman poligami dan perceraian yang sewaktu-waktu bisa mengancam mereka. Budaya poligami merupakan budaya yang umum di Timur Tengah, tetapi merupakan budaya yang baru di Indonesia dan cenderung dianggap tabu di masyarakat. Namun di dalam masyarakat penganut Islam Transnasional, poligami adalah sesuatu yang umum dilakukan. Alasannya karena itu merupakan sunnah yang dahulu pernah dilakukan oleh Rosul. Padahal jika ditelusuri sejarahnya, Rosul hanya melakukan poligami dengan wanita-wanita janda dan tidak mampu, bukannya menikahi wanita-wanita muda yang pada akhirnya membuat iri istri pertama. Apabila mereka ingin menentang keputusan suami, jarang perceraian menanti mereka. Lagi-lagi posisi lemah perempuan dalam gerakan Islam Transnasional menjadikan mereka tidak dapat berbuat dan terpaksa menerima kondisi ini.

Memasuki awal abad ke 21, Gerakan Islam Transnasional semakin menunjukkan pengaruhnya. Organisasi ini semakin militan dalam menjaring pengikut baru dan menyebarkan pahamnya. Salah satu sasaran dari upaya pengkaderan itu adalah orang-orang yang masih awam ilmu agamanya. Jargon-jargon keislaman yang ditampilkan gerakan ini, menyebabkan dari orang-orang itu tertarik bergabung ke dalam organisasi itu (Wahid, 2009: 91). Pada umumnya mereka yang bergabung, tidak bisa membedakan antara budaya Timur Tengah dan ajaran Islam, sehingga mereka menganggap aktivitas oleh orang-orang digerakan itu adalah sebuah ajaran Islam. Hal ini yang menyebabkan banyak perempuan tertarik untuk bergabung ke dalam gerakan itu, meskipun pada prakteknya sikap untuk mendomestifikasi perempuan telah nampak. Pada akhirnya, perempuan-perempuan yang telah terlanjur masuk lingkaran itu, secara tidak sadar menjadi perempuan yang gerakannya sangat dibatasi. Bahkan untuk tampil di ruang publik pun peraturannya sangat ketat, sehingga banyak dari mereka menghabiskan waktunya di rumah atau kajian-kajian tertutup khusus perempuan. Akibatnya doktrin terhadap mereka semakin kuat, berdampak pada anggapan bahwa tampilnya perempuan di ruang publik adalah suatu kemunduran sebagai bentuk kegagalan mempertahankan budaya ketimuran, dan tergantikan budaya barat. Mereka mengatakan perilaku tersebut sebagai demoralisasi perempuan yang secara umum diartikan sebagai kemerosotan spiritualitas tatanan masyarakat (Masharul, 1994: 19).

Akan tetapi apakah benar Islam mengajarkan untuk menempatkan perempuan pada posisi ke dua yang bisa diperlakukan semena-mena oleh kaum pria ataukah perilaku tersebut hanya budaya Timur Tengah yang dianggap sebagai suatu syariat Islam. Al Quran sebagai rujukan utama masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sejajar. Keduanya diciptakan dari satu sumber, yang tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan dalam pernikahan Islam sebenarnya memiliki ciri tidak menggabungkan harta suami dan istri. Istri mempunyai status yang sah dan bebas untuk sepenuhnya mengelola hartanya, yang berarti ia boleh menerima dan mengeluarkan hartanya sendiri tanpa persetujuan suaminya. Perilaku inilah yang sebenarnya yang menjadi ciri utama dari pernikahan Islam (Cora, 2017: 25). Menurut Mansour Fakih (2013: 130) pemikiran yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki berasal dari pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan (1250 – 1800 M). Perempuan yang jarang bicara dan tidak pernah meninggalkan rumah dianggap sebagai tipe ideal. Kultur semacam ini di sebagian masyarakat Islam memang masih dipertahankan, namun di berbagai masyarakat Islam lainnya sudah tidak berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Andaya, Barbara Watson. 1995. *Women and Economy Change: The Pepper Trade in Pre-Modern Southeast Asia. Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. 38, No. 2.*
- Carey, Peter. 2018. *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVII-XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- De Graaf, H.J, & Pigeaud, T.H. 2001. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haq, Masharul. 1994. *Wanita Islam Korban Patologi Sosial* Bandung: Pustaka Amenia.
- Nasution, Harun. 1988. *Pembaharuan dalam Islam: sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka
- Reid, Anthony. 2014. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jilid I Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stuers, Cora Vreede-De. 2007. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Wahid, Abdurrahman (Ed). 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2018. *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama. Yogyakarta
- Wieringa, Saskia E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press.